



Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Icha Khinanty

Universitas Riau

Korespondensi penulis: icha.khinanty2260@student.unri.ac.id

Adianto Adianto

Universitas Riau

E-mail: adianto@lecturer.unri.ac.id

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Abstract. *The regional government of Pelalawan Regency, through the Population and Civil Registration Service of Pelalawan Regency, designed and implemented the Saber Mempro Innovation Program in collaboration with health actors (Puskesmas, Clinics, Hospitals and Village Midwives) in Pelalawan Regency to improve easy population administration services, processes fast, and free. Saber Mempro is a one file program with at least four products where this program aims to make it easier for pregnant women to take care of population administration. This research aims to describe and analyze how collaboration in implementing the Saber Mempro Program is carried out, as well as identifying and analyzing factors that support collaboration in implementing the Saber Mempro Program in Bandar Sei Kijang District, Pelalawan Regency. The method used in this research is qualitative with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation which are then analyzed so that final conclusions can be drawn. The research results show that collaboration between parties involved in implementing the Saber Mempro Program runs well and optimally, this is due to several supporting factors that make the collaboration process in implementing the Saber Mempro program run well, namely budget, facilities and infrastructure, communication, and user participation. program.*

Keywords: *Collaboration, Service, Saber Mempro Program.*

Abstrak. Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan merancang dan merealisasikan Inovasi Program Saber Mempro yang bekerjasama dengan pelaku kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, dan Bidan Desa) yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, proses cepat, dan gratis. Saber Mempro ialah program satu berkas minimal empat produk dimana program ini bertujuan untuk memudahkan ibu hamil dalam mengurus administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kolaborasi dalam penerapan Program Saber Mempro dilakukan, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung kolaborasi dalam penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak yang terlibat dalam penerapan Program Saber Mempro berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor pendukung yang membuat proses kolaborasi dalam penerapan program saber mempro berjalan dengan baik yaitu anggaran, sarana dan prasarana, komunikasi, dan partisipasi pengguna program.

Kata kunci: Kolaborasi, Pelayanan, Program Saber Mempro.

LATAR BELAKANG

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten dengan Motto “Tuah Negeri Seiya Sekata” ini memiliki luas wilayah kurang lebih 12.758,45 km² dan terbelah oleh aliran Sungai Kampar. Kabupaten Pelalawan sendiri memiliki 12 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 Desa serta dengan jumlah penduduk sebanyak 399.264 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 97.269 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Bunut yaitu 15.851 jiwa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan, menegaskan dan memprioritaskan pembangunan pada lima arah kebijakan pembangunan, yaitu:

1. Ekonomi Kerakyatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan melalui perluasan akses dan kesempatan dalam mengelola sumber daya ekonomi.
2. Pendidikan, pengembangan pendidikan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas belajar dan mengajar, serta perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
3. Kesehatan, pengembangan kesehatan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.
4. Perhubungan, pengembangan bidang perhubungan dimaksudkan sebagai upaya memperlancar peningkatan infrastruktur perhubungan dan peningkatan akses jalan pada bidang ekonomi rakyat.
5. Aparatur, pengembangan aparatur dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan aparatur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan mengutamakan mutu pelayanan.

Aparatur sebagai penyelenggara urusan pemerintah, dalam memberikan pelayanan ke masyarakat terkhusus pada pelayanan administrasi masih belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang berfikir bahwa kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pelayanan) ini dapat dilihat dari prosedur yang masih berbelit-belit, sulit, kurang akurat, ketidakpastian waktu/lama, aparatur yang tidak profesional, bahkan sampai biaya administrasi yang dinilai mahal sehingga menyebabkan pelayanan menjadi sulit untuk dijangkau oleh sebagian masyarakat.

Program Saber Mempro digagas dan dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan sejak Tahun Anggaran 2018 silam, dan diresmikan pada Agustus 2019 lalu. Saber Mempro merupakan terobosan atau inovasi percepatan penerbitan cakupan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun sebagaimana dimaksud dalam Nawa Cita Pemerintah Republik Indonesia menetapkan cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran harus mencapai 90% pada tahun 2020, dan Kabupaten Pelalawan hampir memenuhi target mencapai 80%. Tujuan program ini, sebagai langkah pemerintah memangkas administrasi yang dinilai terlalu birokrasi dalam pelayanan pengurusan administrasi kependudukan.

Saber Mempro merupakan program Satu Berkas Minimal Empat Produk dimana program ini bertujuan untuk memudahkan ibu hamil dalam mengurus administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Sasaran dari program Saber Mempro itu sendiri hanya berlaku kepada seluruh ibu hamil, tidak berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dalam rangka pelaksanaan Program Saber Mempro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah bekerjasama dengan pelaku kesehatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan telah menunjuk atau mengangkat Tim Pelaksana Program Saber Mempro yang bekerjasama dengan Bidan Desa, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Rumah Sakit di Kabupaten Pelalawan dalam mendapatkan data ibu hamil agar berjalan efektif, efisien, dan selektif dalam menerbitkan dokumen kependudukan.

Kerjasama ini telah tertuang dalam bentuk surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan Bidan Desa, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Rumah Sakit di Kabupaten Pelalawan. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak dilakukan penandatanganan oleh setiap masing-masing pihak yang bekerjasama dan berakhir setelah 5 tahun. Namun perjanjian ini bisa diperpanjang apabila para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

KAJIAN TEORITIS

Kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Menurut Wanna dalam Sabaruddin (2015), kolaborasi dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagai tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang berkolaborasi

memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta berbasis masyarakat. Menurut Damanpour dalam Firnanda (2015) dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan sementara inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan.

Administrasi menurut Mariati Rahman (2017:7) dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, surat-menyurat, dan sebagainya). Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Proses penelitian kualitatif ini dilakukan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pelayanan program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Penanggung jawab Program Saber Mempro Bapak Nifto Anin, S.Sos., M.si, Sekretaris Program Saber Mempro Bapak Syarbaiani Hakim, M.Pd., Bidan Puskesmas Bandar Sei Kijang Ibu Karni, Bidan Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Ibu Gusnarti dan Ibu

Nurjaniati, Bidan Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang Ibu Yusneti dan Masyarakat pengguna program Saber Mempro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Kolaborasi dalam program saber mempro dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan pelaku kesehatan yang terdiri dari Bidan Desa, Puskesmas, Klinik Bersalin, dan Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Pelalawan. Saber Mempro merupakan terobosan atau inovasi percepatan penerbitan cakupan akta kelahiran bagi anak. Sasaran dari program Saber Mempro itu sendiri hanya berlaku kepada seluruh ibu hamil, tidak berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Cara kerja program ini dimulai sejak ibu hamil memeriksakan kehamilannya, setelah itu pelaku kesehatan akan meminta data administrasi kependudukan ibu hamil seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah.

Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Dialog tatap muka ini penting untuk dilakukan antar kolaborasi yang terlibat sehingga para pihak yang terlibat dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Setelah dilakukannya dialog tatap muka sebagai awal pengenalan, maka perlu dilanjutkan dengan membangun kepercayaan atau yang dapat diartikan sebagai membangun rasa percaya antar pihak yang terlibat dalam program. Komitmen antar pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mencegah gagalnya kerjasama yang dijalankan. Komitmen merupakan komponen yang paling penting dalam proses kolaborasi yang dilakukan, dimana perlu sekali komitmen setiap pihak yang terlibat dalam suatu program agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari awal melakukan kolaborasi. Pemahaman bersama artinya penyatuan pemikiran setiap aktor yang terlibat untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antar aktor dalam berkolaborasi. Dampak sementara ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara konkrit.

Faktor-Faktor Pendukung Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro Di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Anggaran merupakan faktor penting karena biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program tidak lah sedikit. Komunikasi merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini Disdukcapil melakukan komunikasi dengan berkolaborasi

dengan Pelaku kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Bidan Desa melalui Program Saber Mempro. Dalam mendukung kelancaran kolaborasi yang dilakukan dibutuhkannya sarana dan prasarana yang harus diperhatikan. Pelaksanaan program tidak akan berjalan dengan baik jika sarana dan prasarananya tidak memadai. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses berjalannya sebuah kolaborasi. Dengan begitu partisipasi masyarakat akan membantu jalannya proses kolaborasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian dan pembahasan serta analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dan Faktor-faktor pendukung Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan diantaranya yaitu anggaran yang sudah ada disediakan, juga dalam mendukung kelancaran kolaborasi yang dilakukan dibutuhkannya sarana dan prasarana yang harus diperhatikan.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap Kolaborasi dalam Penerapan Program Saber Mempro di Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: Dukcapil perlu melakukan peningkatan dan terus mengevaluasi kinerja program agar tiap tahunnya terus mengalami kenaikan hasil pencapaian dalam penggunaan program. Diharapkan adanya inovasi-inovasi lainnya demi memberikan kemudahan masyarakat dalam memberikan pelayanan-pelayanan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Anggraini, N. D., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE - VOL. 2 NO. 1*.
- Anisa, C., & Rino, A. N. (2019). Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *PUBLIKAUMA, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration, University of California, Berkeley*.

- Arrozaaq, D. L. C. (2018). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Airlangga.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Dharmanu, I. P. (2017). Modernisasi Dan Inovasi Dalam Pelayanan Publik Melalui E-Government Di Kota Denpasar. VII(2), 93–108.
- Eko, K. P., & Argo, P. (2018). *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Melalui E-Government di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: JIAN FIS UNY.
- Ferry, F. (2018). *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Online Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh*. Banda Aceh.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik. Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ihtiarni, A. S. (2023). Kolaborasi Stakeholder Dalam Program Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana Alam, dan Gawat Darurat di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 5(1).
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish.
- Maylani, T., & Mashur, D. (2019). *Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2).
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Muluk, K. (2008). *Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Jatim: Bayumedia Publishing.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press.
- Nafisah, S. V. (2023). *Collaborative Governance dalam Mengatasi Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat Melalui Program Kotaku di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang*. Universitas Tidar, Magelang.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Oktrianita, R., & Endang, L. S. (2018). *Inovasi Pelayanan Akta Gratis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang di Rumah Sakit Umum Ungaran*. Semarang.
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
- Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Putra, A., As'ari, H., & Adianto, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. *Journal Publicuho*, 5(4).
- Ropizal, A. (2022). Proses Inovasi Pelayanan Melalui Program Satu Berkas Minimal Empat Produk (SABER MEMPRO) di Kabupaten Pelalawan. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 20(2).
- Rosidi, A., & Fajriani, R. A. (2013). *Pelayanan Publik Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Vojana, D., Delly, M., & Rachmi, Y. (2021). Kolaborasi Aktor dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)*, 9(2).
- Yahya, H. (2022). Collaborative Governance dalam Program "EPPSON" Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1).